

Pemikiran Konstruktivisme–Neorealisme Bersama Neo-Utilitarianisme Terhadap Konflik Pakistan–India Tahun 2020–2025

Agato Del Blesstin¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

agatodelblesstin@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Konflik India-Pakistan sejak kelahirannya pada 1947 hingga kini masih menyisakan ketegangan dan persaingan yang belum terselesaikan. Penelitian ini mengkaji dinamika konflik Pakistan-India yang secara spesifik dibahas pada periode 2020-2025 melalui kerangka pemikiran secara neorealisme dan konstruktivisme, serta pendekatan terpadu realis-konstruktivis yang diikuti neo-utilitarianisme. Secara realistis, negara-negara terlibat memprioritaskan keamanan dan keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional yang anarkis. Sebaliknya, pendekatan konstruktivis menyoroti peran identitas nasional, norma, dan narasi sejarah dalam membentuk tindakan negara. Dengan menggunakan metode kualitatif analisis literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian terkini seperti gencatan senjata 2021 dan serangan teror 2025 dipengaruhi oleh interaksi antara pertimbangan kekuatan militer dan konstruksi sosial identitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan mitigasi dilema keamanan dengan Identitas Norma.

Kata Kunci: Anarki, Identitas Nasional, Konflik Kashmir, Keseimbangan Kekuatan, Norma Internasional.

ABSTRACT

The long-standing India-Pakistan conflict (1947-present) has persisted as one of the world's oldest unresolved disputes. This study examines specifically the 2020-2025 phase of the Pakistan-India conflict using neorealist and constructivist frameworks, as well as a synthesized realist-constructivist approach followed by neo-utilitarianism. From a realist perspective, both states prioritize security and power balancing within an anarchic international system. Constructivist analysis highlights how national identities, norms, and historical narratives shape state behavior. Employing qualitative literature analysis, the findings suggest that recent developments—such as the 2021 ceasefire and the 2025 terrorist attack—are driven by the interplay of military power considerations and social identity constructs. This implies that conflict resolution requires an integrative approach addressing both security dilemmas and the construction of shared norms.

1. LATAR BELAKANG

Konflik India–Pakistan Menjadi salah satu konflik terlama di dunia internasional. Konflik ini bermula dari pembagian wilayah pada 1947 pasca-mandat Inggris, yang menimbulkan sengketa wilayah utama di Kashmir. India dan Pakistan terlahir sebagai negara yang saling berebut kekuasaan regional: India sebagai republik sekuler dan Pakistan sebagai negara muslim (*Two state theory*). Sementara rezim internasional tidak lebih dari anarki, kedua negara memainkan logika *self-help* untuk keamanan, sebagaimana diteorikan dalam neorealisme (Waltz, 1979; Rajagopalan, 1998). Hasilnya sudah tentu belum terlaksananya perdamaian secara permanen: meski Perjanjian Tashkent (1965) dan Simla (1972) sempat mereda, persoalan Kashmir maupun air sungai Indus terus memicu ketegangan. Selama dekade terakhir, kedua negara tetap menjaga status senjata nuklir sebagai faktor penstabil (*stability-instability paradox*), sehingga



konflik terbatas terus berlanjut tanpa eskalasi penuh. Misalnya, data pemerintah India menunjukkan pelanggaran gencatan senjata (Ceasefire Violations) menurun drastis setelah gencatan senjata 25 Februari 2021. Menurut Surya Krishna (2022), sejak awal tahun 2021 hanya tercatat enam pelanggaran (CFV) hingga pertengahan tahun, jauh lebih sedikit dibanding ribuan kasus di tahun sebelumnya. Gencatan senjata itu juga disertai ketiadaan korban sipil di pihak India sepanjang tahun tersebut, sebuah pencapaian langka dalam konflik berkepanjangan. Namun, kapabilitas militer dan dinamika politik domestik terus menciptakan ketidakpastian. Pada April 2025 misalnya, kelompok militan menembaki turis di Kashmir yang dikuasai India, menimbulkan kerugian warga sipil dan memicu eskalasi ancaman militer kedua negara.

Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya didorong oleh pertimbangan material. Sebagai contoh, pencabutan status khusus Jammu-Kashmir oleh India pada Agustus 2019 (Penghapusan Pasal 370) memperburuk hubungan bilateral dengan Pakistan. Menurut Rehman et al. (2025), langkah tersebut “secara signifikan memperberat hubungan” dan meningkatkan pelanggaran gencatan senjata. Pakistan pun menginternasionalisasi konflik Kashmir ke forum global, sementara India bersikukuh bahwa masalah ini adalah urusan dalam negeri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengapa kedua negara sulit mencapai perdamaian meski upaya diplomasi dan tekanan internasional sudah dilakukan. Secara teori, neorealisme dan konstruktivisme menawarkan penjelasan yang berbeda tentang akar konflik. Neorealisme memandang anarki internasional dan distribusi kekuatan sebagai penyebab utama rivalitas. Sebaliknya, konstruktivisme menekankan bagaimana identitas nasional, ajaran sejarah, dan norma sosial membentuk persepsi ancaman. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut (pendekatan realis-konstruktivis) untuk memahami konflik India–Pakistan 2020–2025, dengan harapan memperoleh pandangan lebih komprehensif terhadap dinamika rivalitas yang terus berlangsung ini.

2. KAJIAN TEORITIS

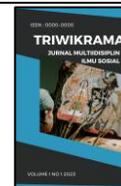
Penelitian Fokus kepada 2 Teori utama, yaitu neorealisme dan konstruktivisme, serta perspektif baru yang mencoba untuk menggabungkan keduanya, yaitu realis-konstruktivis. Neorealisme (realisme struktural). Menurut teori neorealistik (Waltz, 1979), tatanan internasional bersifat anarkis (tanpa otoritas pusat), sehingga negara-negara hanya dapat mengandalkan diri sendiri (self-help) untuk menjamin keamanan. Robert Gilpin menyatakan bahwa dalam politik internasional “pengadil terakhir” adalah kekuasaan (power). Dalam anarki tersebut, negara saling meningkatkan kekuatan militer karena kekhawatiran terhadap negara lain. Rajagopalan (1998) menggarisbawahi bahwa ketidakhadiran otoritas dunia menyebabkan negara-negara terpaksa membangun kekuatan sendiri dan mengantisipasi kekuatan negara lain. Keadaan ini dikenal sebagai *security dilemma*, yang mana upaya suatu negara meningkatkan

keamanan justru mengancam negara lain, mendorong perlombaan senjata dan aliansi militer. Dalam konteks India–Pakistan, kelebihan kekuatan material India (populasi dan ekonomi lebih besar) dipandang sebagai faktor utama ketidakamanan Pakistan. Rajagopalan berargumen bahwa “ketimpangan kekuatan material” tersebut membuat Pakistan merasa terancam sehingga terus meningkatkan militernya. Implikasi neorealis lainnya meliputi penekanan pada stabilitas nuklir (melalui prinsip saling saling jaminan penghancuran), perimbangan kekuatan dengan membangun aliansi (misalnya Pakistan yang dekat dengan China, dan India yang menjalin kemitraan pertahanan dengan Amerika Serikat), serta skeptisisme terhadap kerjasama. Neorealis meramalkan bahwa konflik India–Pakistan akan bertahan selama struktur sistem internasional memotivasi kedua negara untuk menjaga keunggulan militer dan posisi strategis masing-masing.

Secara neorealistik kepentingan keamanan dan kekuatan akan mengarahkan kebijakan kedua negara selama 2020–2025. Konstruktivisme. Sebaliknya, teori konstruktivis menyoroti peran ide, identitas, dan norma dalam politik internasional. Konstruktivis melihat bahwa subyektifitas dan konstruksi sosial menentukan bagaimana negara menafsirkan ancaman dan peluang. Alexander Wendt (1992) menegaskan bahwa “anarki adalah apa yang dibuat oleh negara-negara itu sendiri” (*“anarchy is what states make of it”*), yang berarti struktur internasional tidak memiliki arti baku kecuali melalui persepsi negara. Dengan demikian, situasi internasional menjadi berbeda bergantung pada identitas dan interaksi sosial negara-negara. Dalam konflik India–Pakistan, identitas agama dan nasional menjadi faktor penting. Nasr (2005) menjelaskan bahwa kebangkitan Islamisme di Pakistan dan nasionalisme Hindu di India memperkuat identitas nasional masing-masing, sehingga persaingan kedua negara bertahan dan bahkan menguat. Dari perspektif ini, dua narasi besar terbentang: Pakistan melihat dirinya sebagai negara bagi umat Islam sub-benua (*two state Theory*), sehingga Kashmir yang mayoritas Muslim dianggap merupakan bagian yang “hilang”; disisi lain India melihat Kashmir sebagai bukti kekuatan integrasi sekularnya—melepaskan wilayah Muslim akan dipandang sebagai mengkhianati ideologi negara. Arndt (2018) menegaskan bahwa kedua penjelasan ini saling melengkapi: konfliknya berakar pada kombinasi kekuasaan, wilayah, dan identitas. Norma internasional juga mempengaruhi dinamika.

Konstruktivisme menyoroti bagaimana standar seperti legitimasi kepemilikan wilayah atau larangan agresi membentuk kebijakan negara. Penolakan India atas intervensi militer langsung terhadap Pakistan sering dibingkai melalui norma penghormatan kedaulatan, meski retorika politik domestik kadang mendorong tindakan tegas. Mobilisasi narasi “*Muslim Genocide*” oleh pemimpin Pakistan merupakan konstruksi ideologi yang digunakan untuk menginternasionalkan konflik. Keseluruhan, konstruktivis melihat bahwa konflik India–Pakistan bukan hanya persaingan material dan pergulatan narasi sejarah dan ideologi, yang mempengaruhi pertimbangan pemerintahan dan persepsi publik.

Pandangan realis-konstruktivis mencoba menjembatani kedua pendekatan ini. Barkin (2003, 2010) mengusulkan bahwa realisme dan konstruktivisme tidak harus dipandang bertolak belakang, melainkan bisa diintegrasikan. Struktur kekuasaan dan norma sosial menjadi dua hal yang saling memengaruhi: kekuatan militer dan posisi geopolitik menentukan norma yang berpengaruh (Contoh kecil norma non-



agresi nuklir), sekaligus norma-norma tersebut mengonsolidasikan atau merubah perilaku kekuatan. Arndt (2018) yang mengadopsi kerangka ini menyimpulkan bahwa studi realistis semata tidak cukup menjelaskan konflik India–Pakistan karena melewatkan dimensi identitas dan norma, sedangkan fokus murni konstruktivis mengabaikan faktor kekuatan material. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka realis-konstruktivis untuk menganalisis konflik terbaru: dengan memeriksa bagaimana identitas dan narasi (aspek konstruktif) saling terkait dengan masalah kekuatan dan strategi keamanan (aspek realis) dalam memengaruhi proses politik bilateral.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur ilmiah, artikel jurnal, buku, laporan think-tank, dan sumber resmi pemerintah yang relevan dengan konflik India–Pakistan dan teori hubungan internasional. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, menginterpretasi data tekstual menurut kerangka realisme dan konstruktivisme. Pertama, dilakukan pengumpulan dokumen sekunder: tulisan akademik terbaru (tahun 2018–2025) mengenai hubungan India–Pakistan dan teori IR terkait, misalnya Arndt (2018), Rehman dkk. (2025), dan Krishna (2022). Selain itu, diberdayakan sumber-sumber primer berupa pernyataan resmi militer kedua negara, perjanjian bilateral, dan laporan situasi keamanan dari badan internasional. Kedua, literatur dikaji secara tematik: informasi tentang kejadian konflik (militer, diplomasi, politik dalam negeri) diuraikan untuk dianalisis secara teori. Analisis dilakukan secara deduktif. Konsep-konsep pokok neorealisme (seperti anarki, self-help, keamanan, keseimbangan kekuatan) dan konstruktivisme (identitas, norma, konstruk sosial) digunakan sebagai kata kunci untuk menilai data konflik. Dalam penelitian juga diadopsinya kerangka berpikir secara neo-utilitarianisme untuk menambahkan data analisis kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk bisa menginterpretasikan dinamika institusional dan insentif rasional didalam kerja sama antarnegara, dan juga krusial dalam merespons momen-momen krisis seperti serangan teroris di Kashmir tahun 2025. Dengan demikian, analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan dimensi kekuatan dan identitas, tetapi juga mempertimbangkan peran institusi internasional dan norma prosedural yang berkembang. Pendekatan ini menjadikan penelitian lebih komprehensif dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan konflik dan kemungkinan resolusinya melalui jalur institusional. Hasil analisis dan hasil konflik kemudian dibandingkan dengan literatur penelitian sebelumnya sebagai upaya untuk triangulasi temuan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan mengeksplorasi bagaimana fakta terbaru di lapangan (tahun 2020–2025) dapat dijelaskan dari sudut pandang neorealistik dan konstruktivistik, serta bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi (kerangka realist-constructivist) dalam menjawab tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Neorealistik

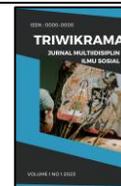
Dari sudut pandang neorealistik, konflik India–Pakistan dipandang sebagai akibat logis dari struktur sistem internasional yang anarkis dan distribusi kekuatan regional. Negara dianggap aktor rasional yang menekankan keamanan dan kekuasaan. Oleh karena itu, rivalitas dipicu oleh ketidakseimbangan kapasitas militer dan pengaruh geopolitik. Pakistan, yang secara material lebih lemah dibanding India, merasa terancam oleh pertumbuhan militer India,

Surya Valliappan Krishna (2022) menegaskan bahwa kesepakatan tersebut menghasilkan efek yang konkrit: penurunan drastis CFV (*Cease Fire Violations*) dan tidak ada korban sipil di pihak India pada 2021. Keconsistenannya dengan teori neorealistik bahwa ketika keamanan material tercapai secara memadai (dengan dikuatnya arsenal nuklir), negara-negara tersebut bersedia meredam konflik terbuka untuk menghindari eskalasi yang tidak perlu. Namun, teori neorealistik juga menjelaskan kenapa stabilitas ini bersifat rapuh. Misalnya, jika salah satu pihak melihat perubahan kekuatan (pergeseran internal atau dukungan eksternal), rasa saling curiga bangkit kembali. Serangan militan di Pahalgam pada (April 2025) dapat dilihat sebagai contoh dinamis: insiden itu memicu krisis keamanan, memaksa kedua negara berhadapan-hadapan secara militer. Neorealis menilai serangan tersebut sebagai “*dreary warfare*” kekerasan terbatas yang menjadi cara kedua belah pihak menunjukkan kemampuan militer sambil mencegah perang total. Dalam hal ini, retorika militer meningkat tetapi hasilnya tidak mengubah prinsip anarki: tidak terjadi serangan lintas-perbatasan besar-besaran, menunjukkan bahwa kendala material (risiko nuklir, tekanan internasional) masih mengikat langkah masing-masing. Dengan kata lain, meski terjadi aksi kekerasan, neorealis melihatnya sebagai kelanjutan konflik sistemik yang terlampaui lama tiada ujung solusi—seluruhnya dijaga oleh faktor-faktor struktur internasional yang sama.

Perspektif Konstruktivis

Pendekatan konstruktivis menggeser perhatian dari dimensi material masuk ke ranah konteks sosial dan identitas yang mendasari konflik. Dalam kasus India–Pakistan, agama dan sejarah masing-masing negara terlibat kuat. Melalui pendekatan ini, konflik bukan hanya soal bangunan militer, tetapi soal narasi nasional yang dianut oleh warga dan elit. Sejak awal kemerdekaan, Kashmir menjadi simbol identitas: bagi Pakistan, wilayah mayoritas Muslim itu dipersepsikan sebagai “barang milik” komunitas Islam subkontinen

nasional yang menjunjung keragaman (sebagai negara sekuler), di mana melepaskannya akan “membelah” bangsa kembali menurut garis agama. Narasi inilah yang membuat diplomasi sulit: kedua rezim tidak hanya memperjuangkan kepentingan politik, tetapi juga nilai-nilai ideologis. Barkin (2010) dalam Arndt (2018) menguraikan bahwa perdebatan soal Kashmir adalah “persimpangan kekuasaan negara, wilayah, dan identitas”.



Dari sisi konstruktivis, setiap langkah provokatif (misalnya pembangunan jalan militer di Kashmir atau pencabutan otonomi wilayah) dianggap usaha menegaskan narasi nasional masing-masing. Keduanya menyuarakan narasi berseberangan: India menekankan kesempatan hidup rukun antaragama, Pakistan menekankan perlindungan umat Muslim. Identitas keagamaan terinternalisasi dalam kebijakan luar negeri kedua negara sehingga musuh selalu diasosiasikan dengan ancaman eksistensial (sebuah korelasi keyakinan). Sebagai contoh konkret, peristiwa pemulangan menteri luar negeri Pakistan sambil mengancam boikot bilateral dalam satu hari mencerminkan bahwa retorika politik didasarkan pada konstruksi identitas: menjaga Kashmir bukan sekadar keamanan, tetapi kepercayaan dasar bagi pemerintah masing-masing. Selain itu, konstruktivisme menyoroti peran norma dan intersubjektivitas. Kedua negara dibentuk oleh norma konflik sejak lama (seperti penyerahan Kashmir sesuai resolusi PBB atau norma anti-separatisme India). Ketika India melanggar norma itu (misalnya membatalkan Pasal 370), Pakistan merespon dengan menegaskan norma dukungan internasional terhadap hak rakyat Kashmir. Persaingan naratif ini memperpanjang konflik: konstruktivis berargumen bahwa tanpa perubahan persepsi dan pemaknaan bersama, solusi material sulit terwujud. Dalam hubungan ini, tindakan militer saling dipertontonkan sebagai bagian dari “peran identitas” masing-masing negara. Misalnya, India mengepung Kashmir sebagai demonstrasi kekuasaan sekular dan kesatuan nasional, sedangkan Pakistan merespon dengan mendukung kelompok pemberontak sebagai pembela komunitas Islam. Fakta bahwa perang skala besar dihindari lebih cenderung dipandang konstruktivis sebagai hasil adanya norma nuklir internasional yang mencegah kematian massal, daripada logika keseimbangan sederhana.

Perpaduan tidak terduga Realistis–Konstruktivis

Memadukan kedua perspektif di atas, pendekatan realistis-konstruktivis melihat bahwa kekuatan militer dan norma sosial saling terkait dalam konflik India–Pakistan. Arndt (2018) menekankan bahwa pendekatan ini “melihat bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi pola perubahan normatif dalam hubungan internasional dan sebaliknya”. Dalam kata lain, struktur kekuatan (power structures) negara-negara ini menentukan norma apa yang diikuti (misalnya non-agresi nuklir atau kedaulatan wilayah), dan norma yang ada turut membentuk perilaku kekuatan. Contohnya, Korea Perjanjian Kashmir: India secara struktural merasa dapat mengontrol wilayah Kashmir berdasarkan kekuatan dominannya. Namun dari sisi konstruktivis, tindakan itu menentang norma internasional tentang penentuan nasib sendiri. Realistis-konstruktivis akan menunjukkan bahwa dualisme ini sulit diselesaikan hanya dengan pertimbangan teknokratis: India tidak hanya memikirkan bahan bakar keamanan (keunggulan militer) tetapi juga dampak ideologis bila melepaskan wilayah, sedangkan Pakistan memperjuangkan norma penentuan nasib sendiri

sambil menimbang risiko militer. Arndt (2018) mencatat bahwa “sintesis kedua pendekatan menunjukkan konflik berakar pada kombinasi kekuasaan dan identitas”.

Pada periode 2020–2025, pendekatan ini berguna untuk memahami siklus aksi reaksi. Sebagai contoh gencatan senjata 2021 secara prinsip bersifat rasional (mengurangi kekerasan), tetapi juga mencerminkan perubahan norma informal bahwa kedua belah pihak setidaknya tidak akan saling menembak lagi. Dengan meratifikasi gencatan senjata, India dan Pakistan sama-sama menunjukkan norma baru tentang perlunya stabilitas di perbatasan, yang kemudian mempengaruhi konteks keamanan. Namun, serangan teroris 2025 mengguncang norma itu: Pakistan menuding India gagal menegakkan keamanan di wilayahnya sendiri (narasi keamanan), sementara India menuduh Pakistan melanggar kewajiban untuk meniadakan teror (narasi keadilan). Melalui lensa realistik-konstruktivis, hal ini dipandang sebagai “perang proxy nilai” di tengah latar distribusi kekuatan yang mapan. Sintesis ini juga menyentuh bidang kebijakan. Sebuah contoh, meski kedua negara berkompetisi dalam perlombaan militer (realis), pembicaraan trilateral dengan Cina dan AS mengenai stabilitas Asia Selatan menunjukkan adanya norma kolaborasi regional baru. Sama seperti gerakan masyarakat sipil yang menuntut penegakan hukum HAM di Kashmir menggoyang narasi nasionalistik dan membuka ruang normatif baru. Realis-konstruktivis menyoroti bahwa inisiatif non-militer (*track-two dialogues*, dan tekanan lembaga multilateral) muncul karena interaksi antara persepsi ancaman dan tuntutan norma internasional. Secara keseluruhan, inti dari pendekatan realistik-konstruktivis menegaskan bahwa konflik Pakistan–India 2020–2025 tidak akan terlaksanakannya perundingan damai bila hanya dipahami hanya lewat lensa satu teori. Kedua perspektif ini harus saling melengkapi: penyelesaian jangka panjang memerlukan mekanisme pengelolaan kekuasaan yang seimbang (mekanisme keamanan bersama) dan simultan perubahan norma serta sikap identitas (pendidikan perdamaian dan dialog budaya). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa memadukan aspek geopolitik dan ideational dapat memberikan penjelasan lebih lengkap tentang pola konflik terkini.

Neo-Utilitarianisme pelengkap Realistik–Konstruktivis Konflik India–Pakistan

Pendekatan realist-konstruktivis yang digunakan dalam memahami konflik India–Pakistan 2020–2025 telah menjelaskan dua dimensi penting: logika kekuatan dan anarki internasional dari neorealisme, serta peran identitas, norma, dan narasi dari konstruktivisme. Namun, agar pendekatan ini mampu menjawab tantangan kebijakan secara praktis, perlu dilengkapi dengan perspektif institusional yang ditawarkan oleh Neo-Utilitarianisme. Pendekatan ini, sebagaimana dikembangkan oleh Robert Keohane dan dijelaskan dalam artikel “*What Makes the World Hang Together?*” (International Organization, 2001), menekankan pentingnya institusi internasional dalam mengurangi biaya transaksi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kerja sama rasional dalam lingkungan yang anarkis.

Dalam konteks konflik India–Pakistan, khususnya setelah serangan teror terhadap wisatawan di Kashmir (ISAFIS, 2025) dan respons militer India yang menimbulkan ancaman balasan dari Pakistan (The



Guardian, 2025), pendekatan neo-utilitarian membantu menjelaskan bagaimana institusi dan norma-norma prosedural dapat mencegah eskalasi. Meskipun kedua negara memiliki keterbatasan kepercayaan, mereka tetap memiliki insentif rasional untuk menghindari perang terbuka, terutama karena risiko destruksi nuklir dan tekanan internasional. Di sinilah institusi seperti gencatan senjata 2021 atau forum regional seperti *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) berperan sebagai arena di mana kepentingan material dan norma sosial bertemu.

Pendekatan neo-utilitarian tidak meniadakan faktor kekuasaan atau identitas, tetapi justru memperkuat dua pendekatan tersebut melalui pengadaan kerangka kerja sama formal. Dalam kerangka realist-konstruktivis, kita memahami bahwa kekuatan dan identitas memengaruhi perilaku negara; dalam kerangka neo-utilitarian, kita melihat bahwa perilaku tersebut dapat dibentuk dan dikelola melalui desain institusional. Dengan kata lain, neo-utilitarianisme memberikan jawaban "bagaimana" terhadap tantangan "mengapa" yang telah dijelaskan oleh realisme dan konstruktivisme. Pendekatan ini menjadi salah satu pendekatan yang sudah banyak dibahas, tetapi sangat sangat terbatas disaat ketiganya dimasukkan menjadi satu pemikiran. kekuatan (*realist*), identitas (*constructivist*), dan insentif institusional (*neo-utilitarianism*). Ketiganya berpotensi membentuk dasar kebijakan luar negeri dan strategi penyelesaian konflik yang lebih komprehensif/holistik . Kerangka pemikiran ini bisa memberikan fondasi yang kuat, terutama pada kasus konflik India–Pakistan agar bisa tercapainya penyelesaian perselisihan dan kesepakatan damai dalam jangka panjang

5. KESIMPULAN DAN SARAN

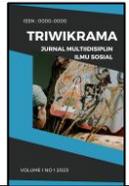
Konflik India–Pakistan 2020–2025 tetap menunjukkan karakteristik lama sekaligus dinamika baru. Konflik ini mencerminkan suatu kompleksitas interaksi antara realitas struktural dan dinamika konstruksional. Pendekatan neorealistik menyoroti bahwa pertarungan kepentingan keamanan dan kekuatan militer terus menjadi motor utama rivalitas. Distribusi kekuatan (termasuk kesetaraan nuklir) menciptakan situasi *stalemate* di mana kedua negara enggan menyerah atau melakukan agresi langsung karena risiko eskalasi yang tinggi. Sementara itu, pendekatan konstruktivis menegaskan bahwa narasi identitas dan norma nilai turut mengintensifkan konflik. Keyakinan keyakinan agama dan sejarah menentukan sikap politik: misalnya, konflik Kashmir dilihat India-Pakistan sebagai isu eksistensial yang tercermin dalam legitimasi kenegaraan masing-masing. Pendekatan realistik-konstruktivis yang diusulkan menyimpulkan bahwa kedua elemen tersebut saling berinteraksi. Perubahan signifikan seperti gencatan senjata 2021 hanya dapat berhasil karena adanya kombinasi faktor: kesadaran strategis kedua pemerintah

bahwa persaingan kekuatan saja tidak lagi produktif, dan secara bersamaan terbentuknya norma implisit untuk menjaga stabilitas. Sebaliknya, kemunduran situasi (seperti lonjakan insiden 2025) terjadi ketika celah diplomasi ditunggangi oleh narasi kebencian dan penafsiran ancaman yang eksis di masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa tanpa pemahaman bersama (*shared understanding*) tentang ancaman dan identitas, kerangka kekuatan realistis saja tidak cukup menghentikan konflik. Sebagai saran kebijakan, diperlukan pendekatan multilevel untuk meredam perseteruan. Dari sisi keamanan (dimensi realis), disarankan penguatan mekanisme pengawasan perbatasan bersama dan dialog militer rutin untuk menghindari kesalahpahaman. Dari sisi normatif (dimensi konstruktivis), perlu program studi sejarah bersama, dialog antaragama, dan keterlibatan masyarakat sipil agar narasi kekerasan perlahan bergeser pada nilai kemanusiaan. Tetapi, kedua cara inipun belum cukup dikarenakan beberapa temuan jurnal yang sudah dianalisis, belum terdapat suatu konklusi untuk jalan penyelesaian konflik ini sehingga Saya sebagai penulis mencari alternatif lain, yaitu pendekatan secara neo-utilitarian. Penjelasan neo-utilitarian berpotensi untuk bisa menjadi jalan baru karena pendekatan ini menunjukkan bahkan didalam lingkungan yang penuh persaingan identitas antar dua negara, masih bisa dibentuk kerja sama melalui suatu institusi yang mampu mereduksi biaya dan ketidakpastian perang. Hal ini menjadi aspek penting dalam tiga pendekatan yang tidak hanya merefleksikan realitas hubungan internasional yang multidimensional, tetapi pendekatan ini juga bisa mengusulkan solusi yang bersifat teknokratik sekaligus humanistik.

DAFTAR REFERENSI

- Barkin, J. S. (2004). *Realist constructivism and Realist-Constructivisms*. *International Studies Review*, 6(2), 348–352. https://doi.org/10.1111/j.1521-9488.2004.419_6.x
- Barkin, J. S. (2020). *Realist Constructivism: An Introduction*. In *Bristol University Press eBooks* (pp. 1–18). <https://doi.org/10.51952/9781529209846.ch001>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). *International norm dynamics and political change*. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Indonesian Student Association for International Studies. (2025, May 19). *Kashmir attack: A major warning for international society [Newsletter]*. ISAFIS. <https://isafis.or.id/2025/05/19/isafis-newsletter-5-2025-kashmir-attack-a-major-warning-for-international-society/>
- Jervis, R. (1976). *Perception and Misperception in International Politics: New Edition (REV-Revised)*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bx3>
- Michael, A. (2018). *Realist-Constructivism and the India–Pakistan Conflict: A new theoretical approach for an old rivalry*. *Asian Politics & Policy*, 10(1), 100–114. <https://doi.org/10.1111/aspp.12365>
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W.W. Norton & Company. Retrieved from <https://samuelbhfauredotcom.files.wordpress.com/2015/10/s2-mearsheimer-2001.pdf>
- Narayanan, R. (2010). *THE INDIA-PAKISTAN DYAD: A CHALLENGE TO THE REST OR TO THEMSELVES?* *Asian Perspective*, 34(4), 165–190. <http://www.jstor.org/stable/42704738>



- Paul, T. V. (Ed.). (2005). *The India-Pakistan Conflict: An Enduring Rivalry*. Cambridge: Cambridge University Press. *Strategic Analysis: Neorealist Theory and the India–Pakistan Conflict**—I. (n.d.). Retrieved May 31, 2025, from https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/sa/sa_98rar01.html
- Rehman, H., Anwar, T., & Haider, R. (2025). Abrogation of Article 370: Impacts on India Pakistan Relations. *Journal of Development and Social Sciences*, 6(1), 258–268. [https://doi.org/10.47205/jdss.2025\(6-1\)23](https://doi.org/10.47205/jdss.2025(6-1)23)
- Ruggie, J. G. (1998). What makes the world hang together? neo-utilitarianism and the social constructivist challenge. *International Organization*, 52(4), 855–885. <https://doi.org/10.1162/002081898550770>
- Surya Valliappan Krishna. *Bordering on Peace: Evaluating the impact of the India-Pakistan ceasefire*. Retrieved from <https://carnegieendowment.org/research/2022/02/bordering-on-peace-evaluating-the-impact-of-the-india-pakistan-ceasefire?lang=en>
- Shafique, A. (2011, September 7). *The case for constructivism in analysing the India-Pakistan conflict*. Retrieved May 31, 2025, from <https://e-ir.info/2011/09/07/the-case-for-constructivism-in-analysing-the-india-pakistan-conflict/>
- Sethi, M. (2022). *Understanding the Nuclear Landscape in Southern Asia: Complexities and Possibilities*. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 5(2), 224–242. <https://doi.org/10.1080/25751654.2022.2156253>
- Wendt, A. (1992). *Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics*. *International Organization*, 46(2), 391–425. <http://www.jstor.org/stable/2706858>
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of international politics*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511612183>